

PENGARUH PAD DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP KINERJA EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KLUNGKUNG

I Komang Juniarta ¹
Made Suyana Utama ²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
e-mail: ikomangjuniarta25@gmail.com

ABSTRAK

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, analisis kemampuan keuangan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum penting untuk dikaji apakah sudah mampu meningkatkan kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Perekonomian, pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Kinerja Perekonomian terhadap Kesejahteraan Masyarakat, serta pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Kinerja Perekonomian di Kabupaten Klungkung. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung. Data yang diperoleh selanjutnya diolah menggunakan metode analisis jalur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara langsung berpengaruh positif terhadap Kinerja Perekonomian. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Kinerja Perekonomian secara langsung berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat, serta Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak langsung terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Kinerja Perekonomian di Kabupaten Klungkung.

Kata kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Kinerja Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat.*

ABSTRACT

In the context of implementing regional autonomy, an analysis of regional financial capacities such as Regional Original Revenues and General Allocation Funds is important to assess whether they have been able to improve economic performance and community welfare. This study aims to determine the direct effect of Regional Original Revenue and General Allocation Funds on Economic Performance, the direct influence of Regional Original Revenue, General Allocation Funds, and Economic Performance on Community Welfare, and the indirect effect of Regional Original Revenue and General Allocation Funds on Public Welfare Economic Performance in Klungkung Regency. The data used in this study are secondary data obtained from the Central Statistics Agency of Bali and Klungkung Provinces. The data obtained are then processed using the path analysis method. The results of this study conclude that the Regional Original Revenue and General Allocation Funds have a direct positive effect on Economic Performance. Regional Original Revenues, General Allocation Funds and Economic Performance directly have a positive effect on Community Welfare, and Regional Original Revenues and General Allocation Funds have an indirect effect on Community Welfare through Economic Performance in Klungkung Regency.

Keywords: *Local Own Revenue, General Allocation Funds, Economic Performance, Community Welfare.*

PENDAHULUAN

Perekonomian yang tumbuh dan berkembang tidak bisa lepas dari peran pemerintah melalui upaya-upaya yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat (Edogbanya *et al.*, 2013). Keberhasilan masa depan suatu daerah di era globalisasi terletak pada pengelolaan produktifitas, perusahaan perubahan-perubahan dan pengelolaan pembangunan kerja secara cepat. Masyarakat kita tergantung pada spesialisasi dari berbagai spesifik untuk menyediakan output dan input yang dihasilkan maupun yang didapat supaya menghindari pengangguran berstruktur, sehingga menaikkan kualitas taraf hidup subjek atau masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran disuatu daerah. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan yang diharapkan oleh setiap daerah tidak terkecuali bagi Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali. Kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali meningkat setiap tahunnya, namun peningkatan cenderung rendah dan masih terjadinya disparitas pendapatan antar daerah (Artana dan Arka, 2015).

Pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kinerja ekonomi bagi setiap daerah itu sendiri dan diharapkan dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Menurut (Hukom, 2014) kinerja ekonomi adalah suatu peluang, karena ekonomi yang tumbuh akan tercipta banyak peluang. Pembangunan sumber daya manusia perlu diperhatikan agar dapat menggunakan peluang yang ada untuk mempertahankan perekonomian tetap tumbuh. Menurut Suartha dan Murjanayasa (2017) berhasil tidaknya pembangunan ditentukan oleh beberapa indikator, salah satunya adalah kinerja ekonomi yang dicerminkan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto. Menurut Adipuryanti dan Sudibia (2015) Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang mengakibatkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk

suatu daerah dalam jangka panjang yang diikuti oleh perbaikan sistem kelembagaan. Sektor informal memegang peranan sangat penting dalam pembangunan ekonomi daerah baik ditinjau dari pendapatan masyarakat secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap pendapatan perkapita. (Putra dan Sudibia, 2018).

Akonji *et al.*, (2013), yang menyatakan belanja publik sebagian besar dikendalikan oleh tingkat kinerja ekonomi. Strategi yang efektif dalam meningkatkan kinerja ekonomi adalah dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi diharapkan dapat mendorong kinerja ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan potensi untuk mengurangi kemiskinan (Miranti *et al.*, 2014).

Era globalisasi ini yang sering disebut era modernisasi ini sangat diperlukan sumber daya manusia dalam rangka memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang meningkat atau kehidupan yang lebih baik diperlukan proses sosial dengan menyeimbangkan atau menselaraskan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah maupun tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat (Dalamagas *et al.*, 2010). Selain itu, Gilbert dan Kehinde (2017) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah di setiap Kabupaten/Kota harus memberikan dorongan agar sektor swasta ada dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Penempatan dana dalam melakukan investasi pengembalian yang tinggi yaitu terdapat dasar dari pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh positif dalam kinerja ekonomi (Mahajan dan Verma 2014).

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat sejak tahun 1990 United Nation Development Program (UNDP) memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau dikenal *Human Development Indeks* (HDI). IPM merupakan ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah yang diarahkan pada tiga indikator yang disusun secara sistematis yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli (Peggy dan Swaningrum, 2015). Menurut Bhakti dan Abdul (2013) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator

komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk.

Selama tahun 2014-2018 IPM di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sedikit memiliki kecenderungan meningkat, seperti yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali, 2014-2018

Kabupaten/ Kota	Tahun (dalam Indeks)					Rata- Rata
	2014	2015	2016	2017	2018	
Jembrana	68,67	69,66	70,38	70,72	71,65	69,86
Tabanan	72,68	73,54	74,19	74,86	75,45	74,14
Badung	77,98	78,86	79,80	80,54	80,87	79,61
Gianyar	74,29	75,03	75,70	76,09	76,61	75,28
Klungkung	68,30	68,98	69,31	70,13	70,90	69,36
Bangli	65,75	66,24	67,03	68,24	68,96	66,82
Karangasem	64,01	64,68	65,23	65,57	66,49	65,20
Buleleng	69,19	70,03	70,65	71,11	71,07	70,41
Denpasar	81,65	82,24	82,58	83,01	83,03	82,50
Provinsi Bali	72,48	73,27	73,65	74,30	74,77	73,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2019

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Bali yang ditunjukkan pada Tabel 1 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali terus mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai 2018. Dimana pada tahun 2014 jumlah IPM sebesar 72,48 dan sampai tahun 2018 telah mencapai 74,77. Tabel 1 juga menunjukkan bahwa IPM rata Kabupaten/Kota di Provinsi Bali selama tahun 2014 – 2018 yang terbesar terdapat di Kota Denpasar, yaitu sebesar 82,50 sedangkan IPM terendah terdapat di Kabupaten Karangasem 65,20.

Perbedaan IPM antar Kabupaten/Kota tersebut tentu disebabkan oleh perbedaan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Sumberdaya yang dimaksud antara lain sumber dana pembangunan dan pelayanan baik yang diperoleh dari pemerintah pusat, juga yang diperoleh dari daerah sendiri dan pengalokasiannya, serta kondisi ekonomi. Seperti diketahui bahwa IPM diukur berdasarkan dengan kinerja pendidikan, kesehatan, dan

ekonomi, maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah hal ini sangat berkaitan dengan tersedianya sumber-sumber anggaran pemerintah untuk mendukung terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, maka semakin bagus IPM pada suatu daerah. Suwandi (2000) menegaskan bahwa kemampuan Pemda dalam menjalankan fungsi-fungsi seperti melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*), melaksanakan fungsi pembangunan (*development function*) dan melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat (*protective function*) adalah kemampuan keuangan daerah. Rendahnya kemampuan keuangan daerah akan sering menimbulkan siklus efek negatif, yaitu rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat sehingga sulit untuk meningkatkan kesejahteraannya. Disamping berkaitan dengan anggaran, IPM juga berkaitan dengan kinerja perekonomian suatu daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mendapatkan beberapa sumber pendapatan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan dana lainnya. Di samping itu daerah mendapatkan kewenangan menggali sumber-sumber keuangan dari daerah sendiri yang disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber keuangan yang disebutkan tersebut sesuai perundang-undangan memiliki peruntukan tersendiri dalam rangka membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja ekonomi. Menurut McEachern (2000) bahwa indikator kinerja ekonomi adalah rata-rata penghasilan menghasilkan masyarakat, disamping jumlah tenaga kerja, jumlah produksi, jumlah perusahaan, pengangguran, inflasi, dan lain-lain. Untuk skala daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita merupakan indikator kinerja ekonomi yang paling sering digunakan.

Menurut Resosudarmo (2018), berbagai program efektif untuk meningkatkan modal manusia dan inovasi sangat penting untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Guritno (2012) juga mengatakan bahwa meningkatnya penerimaan pemerintah akan mendorong pemerintah meningkatkan pengeluarannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga pendapatannya meningkat, pengangguran dan kemiskinan berkurang. Meningkatnya kinerja ekonomi berarti terjadinya peningkatan kapasitas fiskal pada suatu daerah atau negara yang dicerminkan oleh adanya pertambahan modal untuk industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya (Pere, 2015). Menurut Akudugu (2012), menyatakan bahwa pembangunan sosial ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah diharapkan dapat terwujud oleh upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Zouhaier (2012), dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat memberikan angin segar terhadap kesejahteraan daerah. Kebijakan otonomi selain tercermin dari wewenang daerah mengatur keuangan dan pemanfaatan sumberdaya daerah, juga tercermin dari keterbukaan ekonomi daerah tersebut (Fajrii, dkk. 2016). Menurut Nurudeen (2010) bahwa peranan Pemerintah dalam pembangunan di suatu daerah sangat penting. Pengembangan infrastruktur merupakan pusat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di suatu Daerah. Oleh karena itu kuantitas dan kualitas infrastruktur yang tersedia dan aksesibilitasnya terhadap penerima manfaat yang seharusnya dapat dianggap sebagai indeks pembangunan disuatu Daerah (Fasoranti, 2012).

Beberapa studi sebelumnya mengenai hubungan PAD dengan IPM antara lain yang dilakukan oleh Mahendra Putra dan Agung Ulupui (2015) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap IPM di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah

mendapatkan kewenangan menggali sumber-sumber pendapatan di daerah yang disebut Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu dalam otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerahnya untuk digali sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk belanja modal sehingga kesejahteraan meningkat.

Demikian juga kinerja ekonomi merupakan indikator penting terhadap perkembangan IPM. Hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM dapat dilihat dari hasil penelitian Asmita dkk (2017). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa meningkatkan pendapatan perkapita menyebabkan meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan adanya peranan pemerintah daerah memanfaatkan semua sumber daya secara optimal (Fajrii dkk, 2016).

Pendapatan Asli Daerah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan sifat penggunaan yang lebih fleksibel semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki oleh suatu daerah, semakin besar pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari penelitian Hammod dan Mehmet (2009) yang menyimpulkan bahwa desentralisasi atau otonomi yang dicerminkan oleh kemandirian keuangan daerah atau rasio antara Pendapatan Asli Daerah dengan APBD memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan pendapatan daerah di Amerika Serikat. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: 1) untuk menganalisis pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten Klungkung; 2) untuk menganalisis pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Kinerja Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Klungkung; dan 3) untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum

berpengaruh secara tidak langsung terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Kinerja Ekonomi di Kabupaten Klungkung.

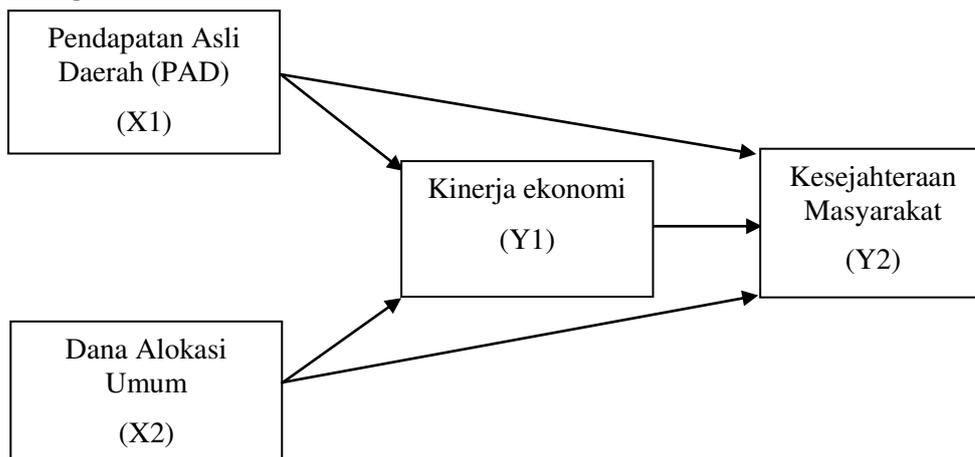
METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif atau angka-angka yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris dengan menggunakan analisis statistik, dengan pola hubungan kausalitas antar variabel melalui metode analisis jalur atau *path analysis*. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klungkung, dengan pertimbangan Kabupaten Klungkung pada tahun 2018 memiliki tingkat IPM yang paling rendah ketiga dan presentase penduduk miskin kedua tertinggi di Provinsi Bali yaitu 5,86 persen setelah Kabupaten Karangasem pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Objek Penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Kinerja Ekonomi, dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat yang di ukur melalui IPM di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali pada periode 2001-2018. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto, dan Indeks Pembangunan Manusia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah terlebih dahulu oleh pihak lain (Sugiyono, 2015:15). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta literatur-literatur yang mendukung objek penelitian.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan cara observasi non partisipan. Observasi non partisipan adalah observasi yang hanya mengumpulkan data yang telah tersedia oleh badan atau lembaga tertentu, di mana peneliti tidak terlibat langsung (Sugiyono, 2015:247). Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, dan mempelajari uraian dari buku - buku, karya ilmiah seperti skripsi, artikel, dan dokumen. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis jalur (*path*

analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang berjenjang berdasarkan teori (Utama, 2016:159). Analisis jalur digunakan untuk mengetahui hubungan langsung variabel independen terhadap variabel dependen dan hubungan tidak langsung yang melalui variabel intervening.



Gambar 2 Kerangka Konseptual Penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Klungkung.

Dalam penelitian ini didapatkan persamaan model struktural sebagai berikut

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon_1 \dots\dots\dots(1)$$

$$Y_2 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + \varepsilon_2 \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- X₁ = Pendapatan Asli Daerah
- X₂ = Dana Alokasi Umum
- Y₁ = Kinerja ekonomi
- Y₂ = Kesejahteraan Masyarakat
- β₁ , β₂β₅ = Koefisien jalur
- ε₁ , ε₂ = Error

Menurut Mardiasmo (2002: 132), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang di peroleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Desentralisasi berarti penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat

atasnya kepada daerah (Kuncoro, 2006: 497). Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi kinerja ekonomi di daerah tersebut.

Menurut Brata (2004) yang dikutip oleh Adi dan Harianto (2007) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah serta sumbangan dan bantuan. Menurut Pujiati, (2008), dengan adanya kewenangan daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sehingga komposisi Pendapatan Asli Daerah sebagai penerimaan daerah juga meningkat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan akan mempercepat kinerja ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat Tambunan (2006:36), bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan kinerja ekonomi daerah itu. Namun apabila eksploitasi Pendapatan Asli Daerah dilakukan secara berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002:87).

Pengaruh dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya dana alokasi umum maka akan meningkatkan kinerja ekonomi di suatu Daerah/Kota. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya dana alokasi umum maka kinerja ekonomi di Daerah/Kota akan meningkat (Uhise, 2013).

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia apabila pengalokasian dana tersebut tepat dan berjalan sesuai dengan sasaran. Setyowati dan Suparwati (2012) menyatakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas

pelayanan publik, pemerintah daerah hendaknya mampu mengubah proporsi belanja yang dialokasikan untuk tujuan dan hal-hal yang positif seperti melakukan aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan program-program kepentingan publik. Adanya program-program untuk kepentingan publik diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang akhirnya berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Mahendra dan Ulupui, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah

Klungkung adalah Kabupaten yang terkecil wilayahnya dibanding dengan Kabupaten lainnya di Bali. Kabupaten Klungkung mempunyai luas wilayah 315,00 Km² atau 31.500 Ha, dimana hanya ± 112,16 Km² terletak di daratan Pulau Bali dan sisanya 202,84 Km² lagi merupakan daerah kepulauan yaitu Pulau Nusa Penida, Lembongan dan Ceningan. Daerah ini terletak di antara 115 0 21' 28" BT – 115 0 37' 43" BT dan 80 27' 37" LS – 80 49' 00" LS, dengan batas-batas wilayahnya adalah sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karangasem, sebelah utaranya berbatasan dengan Kabupaten Bangli, sedangkan Kabupaten Gianyar di sebelah barat serta Samudera Indonesia membatasi wilayah selatan dari Kabupaten Klungkung.

Kabupaten Klungkung dibagi menjadi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Dawan, dan Nusa Penida. Luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Luas Wilayah Kabupaten Klungkung Menurut Kecamatan, Tahun 2018

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persen
Nusa Penida	20.941	66.48
Banjarangkan	4.573	14.52
Klungkung	2.905	9.22
Dawan	3.081	9.78

Jumlah	31.500	100.00
--------	--------	--------

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, 2019

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa sebagian besar atau 66,4 persen wilayah Kabupaten Klungkung berada di Kecamatan Nusa Penida. Namun wilayah ini tanahnya tandus dan sebagian besar merupakan batu gamping. Wilayah paling sempit adalah Kecamatan Klungkung, yaitu seluas 2.905 km² atau sekitar 9,22 persen dari wilayah Kabupaten Klungkung.

Selain menurut Kecamatan, wilayah di bawah Kecamatan dibagi menjadi Desa/Kelurahan dan Desa Adat, selanjutnya dibagi lagi menjadi Dusun dan Banjar Adat. Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah Desa/Kelurahan, Desa Adat, Dusun, dan Banjar paling banyak terdapat di Kecamatan Nusa Penida, sedangkan wilayah yang paling sedikit memiliki Desa/Kelurahan, Desa Adat, Dusun, dan Banjar adalah Kecamatan Dawan.

Tabel 3 Jumlah Desa/Kelurahan, Desa Adat, Dusun Dan Banjar Menurut Kecamatan di Kabupaten Klungkung, Tahun 2019

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Dusun	Desa Adat	Banjar Adat
1.	Nusa Penida	16	80	40	157
2.	Banjarangkan	13	55	30	75
3.	Klungkung	18	60	23	90
4.	Dawan	12	49	20	66
	Total	59	244	113	394

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, 2019

Pengujian Pengaruh Langsung

1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X₁) dan Dana Alokasi Umum (X₂) terhadap Kinerja Ekonomi (Y₁)

Berdasarkan hasil olahan data pada Lampiran 3 pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X₁) dan Dana Alokasi Umum (X₂) terhadap Kinerja Ekonomi (Y₁) dapat diringkas seperti yang disajikan pada Tabel 4.8. Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa model regresi yang dibuat mempunyai validitas yang tinggi, karena F-statistik sebesar 133,470 dengan tingkat signifikansi 0,000, dan R kuadrat sebesar 0,947. R kuadrat sebesar 0,947 memiliki

arti bahwa 94,7 persen variasi dari Kinerja Ekonomi di Kabupaten Klungkung selama tahun 2001 – 2018 mampu dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum, sedangkan sisanya 5,3 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak ada dalam model.

Tabel 4 Ringkasan Hasil Regresi Substruktur 1: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten Klungkung, Tahun 2001 - 2018

	Koefisien Takstandar		Koefisien Terstandar Beta	't	Sig.
	B	Std. Error			
Konstanta	11,015	0,697		15,815	0,000
PAD (X ₁)	2,322	0,214	0,745	10,852	0,000
DAU (X ₂)	0,263	0,062	0,290	4,231	0,001
R Squared		0,971	F - statistic		250,864
R Squared Adjusted		0,967	Prob. (F-Statistic)		0,000

Sumber : Hasil olahan data, 2019

Dengan demikian, diperoleh persamaan regresi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X₁) dan Dana Alokasi Umum (X₂) terhadap Kinerja Ekonomi (Y₁) adalah:

$$Y_1 = 0,745 X_1 + 0,290 X_2 \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan:

X₁ adalah Pendapatan Asli Daerah

X₂ adalah Dana Alokasi Umum

a) Pengujian pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Ekonomi

Oleh karena t sebesar 10,852 yang lebih besar dari 1,753 maka Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten Klungkung. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah menyebabkan Kinerja Ekonomi di Kabupaten Klungkung meningkat.

b) Pengujian pengaruh langsung Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Ekonomi

Oleh karena t sebesar 4,231 yang lebih besar dari 1,753 maka Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten Klungkung. Artinya

meningkatnya Dana Alokasi Umum menyebabkan Kinerja Ekonomi di Kabupaten Klungkung meningkat.

2) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), dan Kinerja Ekonomi (Y_1) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y_2)

Berdasarkan hasil olahan data pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), dan Kinerja Ekonomi (Y_1) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y_2) dapat diringkas seperti yang disajikan pada Tabel 4.9. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa 4 pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), dan Kinerja Ekonomi (Y_1) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y_2) memiliki F-statistik sebesar 736,422 dengan tingkat signifikansi 0,000, dan R kuadrat sebesar 0,992. Dengan demikian model tersebut memiliki validitas yang sangat tinggi. R kuadrat sebesar 0,992 memiliki arti bahwa 99,2 persen variasi dari Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Klungkung selama tahun 2001 – 2018 mampu dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Kinerja Ekonomi, sedangkan sisanya 0,8 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak ada dalam model.

Tabel 5 Ringkasan Hasil Regresi Substruktur 2: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Kinerja Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Klungkung, Tahun 2001 - 2018

	Koefisien Takstandar		Koefisien Terstandar Beta	't	Sig.
	B	Std. Error			
Konstanta	57,072	0,857		66,572	0,000
PAD (X1)	0,457	0,186	0,279	2,453	0,028
DAU (X2)	0,148	0,027	0,311	5,483	0,000
KE (Y1)	0,235	0,076	0,448	3,112	0,008
R Squared		0,992	F - statistic		548,817
R Squared Adjusted		0,990	Prob. (F-Statistic)		0,000

Sumber : Hasil olahan data, 2019

Berdasarkan Tabel 5 persamaan regresi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Alokasi Umum (X_2) terhadap Kinerja Ekonomi (Y_1) adalah:

$$Y_2 = 0,279 X_1 + 0,311 X_2 + 0,448 Y_1 \dots\dots\dots(3)$$

a) Pengujian pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Oleh karena t sebesar 2,453 yang lebih besar dari 1,761 maka Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Klungkung. Artinya, dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah menyebabkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Klungkung meningkat.

b) Pengujian pengaruh langsung Dana Alokasi Umum terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Oleh karena t sebesar 5,483 yang lebih besar dari 1,761 maka Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Klungkung. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan meningkatnya Dana Alokasi Umum menyebabkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Klungkung meningkat.

c) Pengujian pengaruh langsung Kinerja Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Oleh karena t sebesar 3,112 yang lebih besar dari 1,761 maka Dana Kinerja Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Klungkung. Keadaan tersebut dapat diartikan bahwa dengan meningkatnya Kinerja Ekonomi menyebabkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Klungkung meningkat.

Berdasarkan Tabel 4 dan Tabel 5 dapat dibuat ringkasan jalur pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Kinerja Ekonomi terhadap Kesejahteraan

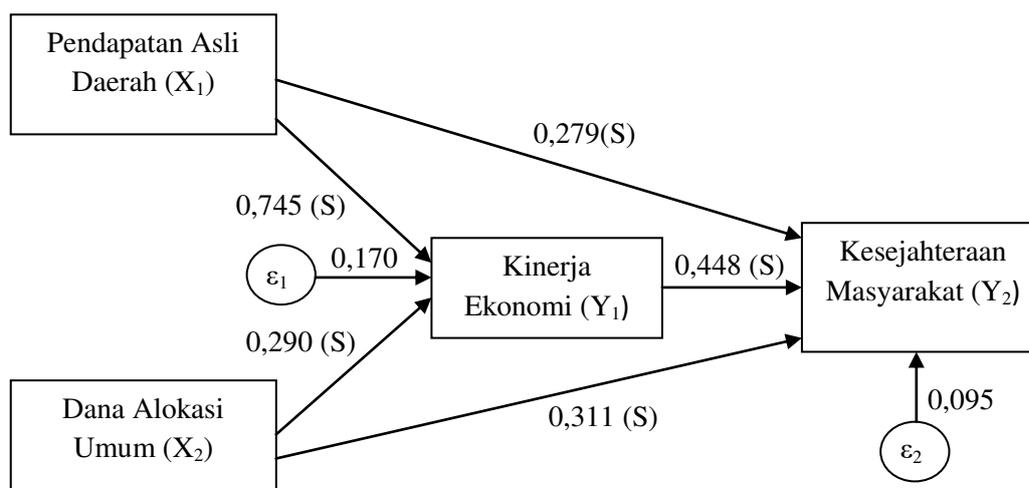
Masyarakat di Kabupaten Klungkung, Tahun 2001 – 2018 seperti yang ditampilkan pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 6 Koefisien Regresi dan Koefisien Jalur Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Kinerja Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Klungkung, Tahun 2001 - 2018

Hubungan Variabel	Koefisien Takstandar		Koefisien Terstandar Beta	't	Sig.
	B	Std. Error			
PAD (X1) → KE (Y1)	2,322	0,214	0,745	10,852	0,000
DAU (X2) → KE (Y1)	0,263	0,062	0,290	4,231	0,001
PAD (X1) → KM (Y2)	0,457	0,186	0,279	2,453	0,028
DAU (X2) → KM (Y2)	0,148	0,027	0,311	5,483	0,000
KE (Y1) → KM (Y2)	0,235	0,076	0,448	3,112	0,008

Sumber: Hasil olahan data, 2019

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Perekonomian dengan signifikansi kurang dari 1 persen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kinerja Perekonomian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan signifikansi kurang dari 5 persen.



Gambar 2 Koefisien Jalur Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Klungkung

Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa variabel yang lebih besar berpengaruh terhadap Kinerja Ekonomi adalah Pendapatan Asli Daerah dengan koefisien jalur sebesar 0,745, sedangkan Dana Alokasi Umum memiliki koefisien jalur sebesar 0,290. Di pihak lain variabel yang paling besar berpengaruh terhadap Kesejahteraan masyarakat adalah variabel Kinerja Ekonomi dengan koefisien jalur sebesar 0,448, yang kedua adalah variabel Dana Alokasi Umum dengan koefisien jalur sebesar 0,311, dan terakhir variabel Dana Alokasi Umum dengan koefisien jalur sebesar 0,279.

Dari Gambar 2 dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh paling besar terhadap Kinerja Ekonomi, namun terhadap Kesejahteraan Masyarakat pengaruhnya paling kecil. Hal ini mencerminkan bahwa Pendapatan Asli Daerah lebih banyak untuk menumbuhkan perekonomian dibandingkan dengan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Validitas Model Analisis Lajur

Berdasarkan sub persamaan struktural 1 dan 2 diketahui bahwa R^2 masing-masing, $R_1^2 = 0,947$ dan $R_2^2 = 0,994$. Dengan demikian error masing-masing persamaan dapat dihitung:

$$\varepsilon_i = \sqrt{1 - R_i^2}$$

$$\varepsilon_1 = \sqrt{1 - 0,947}$$

$$\varepsilon_1 = 0,230$$

$$\varepsilon_2 = \sqrt{1 - 0,994}$$

$$\varepsilon_2 = 0,077$$

Berdasarkan error tersebut dapat dihitung koefisien determinasi total dengan rumus:

$$R_m^2 = 1 - (\varepsilon_1^2)(\varepsilon_2^2)$$

$$R_m^2 = 1 - (0,230)(0,077)$$

$$R_m^2 = 0,997$$

Berdasarkan koefisien determinasi total sebesar 0,997 dapat disimpulkan bahwa model analisis jalur yang dibuat memiliki validitas yang sangat tinggi. Koefisien determinasi total sebesar 0,997 diinterpretasikan bahwa 99,7 persen variasi dari variabel Kesejahteraan Masyarakat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Kinerja Ekonomi, sedangkan sisanya hanya 0,3 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak ada dalam model.

Pengaruh Tidak Langsung

1) Pengaruh Tidak Langsung Pendapatan Asli Daerah (X₁) dan Dana Alokasi Umum (X₂) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y₂) melalui Kinerja Ekonomi (Y₁)

Perhitungan statistik PAD → KE → KM

$$a = \text{PAD} \rightarrow \text{KE} = 2,322$$

$$b = \text{KE} \rightarrow \text{KM} = 0,235$$

$$S_a = \text{PAD} \rightarrow \text{KE} = 0,214$$

$$S_b = \text{KE} \rightarrow \text{KM} = 0,076$$

$$z = \frac{ab}{S_{ab}}$$

$$ab = (2,322 \times 0,235)$$

$$ab = 0,546$$

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 S_a^2 + a^2 S_b^2}$$

$$S_{ab} = \sqrt{(0,235^2)(0,214^2) + (2,322^2)(0,076^2)}$$

$$S_{ab} = 0,183$$

$$z = 0,546/0,183$$

Oleh karena z hitung sebesar 2,991 yang lebih besar dari 1,96, maka H₀ ditolak.

Hal ini berarti bahwa Kinerja Ekonomi merupakan variabel intervening pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Klungkung selama tahun 2001 – 2018. Oleh karena secara langsung dan tidak langsung variabel

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, maka peran dari Kinerja Ekonomi dikategorikan sebagai “intervening parsial”.

(2) Pengujian pengaruh Tidak Langsung Dana Alokasi Umum (X_2) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y_2) melalui Kinerja Ekonomi (Y_1)

Perhitungan statistik : DAU \rightarrow KE \rightarrow KM

$$a = \text{DAU} \rightarrow \text{KE} = 0,263$$

$$b = \text{KE} \rightarrow \text{KM} = 0,235$$

$$S_a = \text{DAU} \rightarrow \text{KE} = 0,062$$

$$S_b = \text{KE} \rightarrow \text{KM} = 0,076$$

$$z = \frac{ab}{S_{ab}}$$

$$ab = (0,263 \times 0,235)$$

$$ab = 0,062$$

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 S_a^2 + a^2 S_b^2}$$

$$S_{ab} = \sqrt{(0,235^2)(0,062^2) + (0,263^2)(0,076^2)}$$

$$S_{ab} = 0,025$$

$$z = 0,062/0,025$$

$$z = 2,507$$

Oleh karena z hitung sebesar 2,507 yang lebih besar dari 1,96, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa Kinerja Ekonomi merupakan variabel intervening pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Klungkung selama tahun 2001 – 2018. Oleh karena secara langsung dan tidak langsung variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, maka peran dari Kinerja Ekonomi juga digategorikan sebagai “intervening parsial”.

Selanjutnya koefisien pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Kinerja Ekonomi dapat dihitung:

$$\text{PAD} \rightarrow \text{KE} \rightarrow \text{KM} = 0,745 \times 0,448 = 0,334$$

$$\text{DAU} \rightarrow \text{KE} \rightarrow \text{KM} = 0,290 \times 0,448 = 0,130$$

Berdasarkan hasil perhitung pengaruh langsung dan tidak langsung dapat dibuat pengaruh total seperti yang disajikan pada Tabel 4.11

Tabel 7 Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total Variabel Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kinerja Ekonomi di Kabupaten Klungkung, Tahun 2001 – 2018

Hubungan Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Pengaruh Total	Peran Intervening (%)
PAD → KE	0,745	-	0,745	-
DAU → KE	0,279	-	0,279	-
PAD → KM	0,290	0,334	0,624	53,51
DAU → KM	0,311	0,130	0,441	29,46
KE → KM	0,448	-	0,448	-

Sumber: Hasil olahan data, 2019

Keterangan: PAD = Pendapatan Asli Daerah
 DAU = Dana Alokasi Umum
 KE = Kinerja Ekonomi
 KM = Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan Tabel 7 dapat dijelaskan bahwa pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat adalah dengan koefisien jalur 0,290, sedangkan pengaruh tidak langsungnya sebesar 0,334. Oleh karena itu pengaruh totalnya sebesar 0,624. Dengan demikian peran variabel Kinerja Ekonomi sebagai intervening pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat adalah sebesar 53,51 persen dari pengaruh totalnya. Di pihak lain, pengaruh langsung Dana Alokasi Umum terhadap Kesejahteraan masyarakat adalah dengan koefisien jalur 0,311, sedangkan pengaruh tidak langsung sebesar 0,130. Oleh karena itu pengaruh totalnya sebesar 0,441. Dengan demikian peran variabel Kinerja Ekonomi sebagai intervening pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kesejahteraan Masyarakat adalah sebesar 29,46 persen dari pengaruh totalnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, peran variabel Kinerja Ekonomi sebagai variabel intervening lebih besar pada Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pada Dana Alokasi Umum.

Implikasi Hasil Penelitian

1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten Klungkung

Hasil penelitian ini secara statistik menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Ekonomi. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klungkung, menyebabkan Kinerja Ekonomi, yang diukur dengan pendapatan per kapita riil menjadi meningkat. Hasil Penelitian sesuai dengan penelitian Hammond dan Mehmet S Tosun (2009) yang berjudul: “The Impact of Local Decentralization on Economic Growth: Evidence from U.S. Counties”, menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dalam rangka otonomi daerah di Amerika Serikat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Widyasari (2013) tentang pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB).

Hasil penelitian ini secara statistik juga menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Kinerja Ekonomi. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klungkung, menyebabkan Kinerja Ekonomi. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Widyasari (2013) tentang pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB).

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Rudy Badrudin dan Irawan Kuncorojati yang berjudul "*The Effect Of District Own-Source Revenue And Balance Funds On Public Welfare By Capital Expenditure And Economic Growth As An Intervening Variable In Special District of Yogyakarta*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal dan kesejahteraan di Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta.

2) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Kinerja Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Klungkung

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Kinerja Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Klungkung. Artinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Kinerja Ekonomi berdampak terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat secara signifikan. PAD sangat berperan penting dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia pada tiap Kabupaten dan Kota. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah akan berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur untuk keperluan publik seperti, perbaikan sarana penunjang kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum lainnya. PAD merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dalam mendukung kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam konteks ini, PAD merupakan pendapatan daerah sendiri sangat di harapkan sebagai sumber pembiayaan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat termasuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang juga menunjukkan hasil yang sama seperti pada penelitian ini. Wardani (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh aset

daerah, PAD, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Yanto *et al.* (2018) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Adanya pengaruh positif dan signifikan kinerja ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai dengan laporan World Bank (2001) yang menyebutkan bahwa meningkatnya pendapatan masyarakat menyebabkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan meningkat, sehingga akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai dengan hasil penelitian Sudiarta dan Suyana Utama (2019) dalam penelitian yang berjudul: “*The Effect of Regional Financial Performance on Inclusive Economic Growth and Community Welfare in Regency/City in Bali Province*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2012 – 2019.

3) Pengaruh Tidak Langsung Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kinerja Ekonomi di Kabupaten Klungkung

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara tidak langsung terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Kinerja Ekonomi di Kabupaten Klungkung. Artinya bahwa jika Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum meningkat, kinerja ekonomi menjadi meningkat, dan dengan meningkatnya kinerja ekonomi memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam analisis statistik sebelumnya disimpulkan bahwa variabel Kinerja Ekonomi memiliki

paran sebagai variabel intervening lebih besar pada Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pada Dana Alokasi Umum. Dengan kata lain, pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat setelah melalui Kinerja Ekonomi lebih besar dibandingkan dengan pengaruh Dana Alokasi Umum Pendapatan Asli Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat setelah melalui Kinerja Ekonomi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Wijayanti dan Darsana (2015) meneliti tentang pengaruh PAD dan DAU terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi (studi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2008-2013). Menurut Dewi dan Sutrisna (2014), menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan akhir dari terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka terciptanya desentralisasi fiskal.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan; 1) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten Klungkung. Hal ini memiliki arti bahwa meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum menyebabkan Kinerja Ekonomi di Kabupaten Klungkung dengan indikator pendapatan per kapita riil juga meningkat; 2) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Kinerja Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Klungkung. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Kinerja Ekonomi dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Klungkung dengan indikator Indeks pembangunan Manusia; dan 3) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara tidak langsung terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Kinerja Ekonomi di Kabupaten Klungkung. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum menyebabkan Kinerja

Ekonomi meningkat, selanjutnya dengan meningkatnya Kinerja Ekonomi menyebabkan Kesejahteraan Masyarakat meningkat.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan pemaparan simpulan di atas yaitu dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh paling besar terhadap Kinerja Ekonomi, namun terhadap Kesejahteraan Masyarakat pengaruhnya paling kecil. Hal ini mencerminkan bahwa Pendapatan Asli Daerah lebih banyak untuk menumbuhkan perekonomian dibandingkan dengan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung diharapkan ke depan terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta mengalokasikannya lebih banyak untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan menginsentifkasi pungutan Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan teknologi dan informasi berbasis komputer. Kemudian peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dilakukan dengan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana Pendidikan dan Kesehatan.

REFERENSI

- Abel, Andrew B. And Ben S. Bernake. 2001. *Macroeconomics*. New York : Addison Wesley Longman, Inc.
- Adi & Harianto. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Perkapita. *Jurnal Akuntansi UNHAS Makasar*. Hal. 15.
- Adipuryanti dan Sudibia. 2015. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Investasi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Kinerja ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal PIRAMIDA*. Vol. 11, No. 1. Hal : 20-28.
- Akonji, D. A., Olubukola, O. A., and Wakilia, A. M. 2013. Nexus Between Public Expenditure and Economic Growth By Testing Wagner's Law Time Series: Evidence From Nigeria. *International Journal of Development and Sustainability*. 2(4). Hal: 2383-2395.
- Akudugu, Jonas Ayaribilla. 2012. Accountabillity in local Government revenue management: who does what?. *Journal of Sustainable Development*. 2(2). Hal : 22-32.

- Artana Yasa dan Sudarsana Arka. 2015. Pengaruh Kinerja ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1). Hal: 63-71.
- Asmita, Fitrawaty, Dede Ruslan. 2017. Analysis of Factors Affecting the Human Development Index in North Sumatra Province. *IOSR Journal of Business and Management* (IOSR-JBM. e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 19, Issue 10. Ver. VII. (October.2017), PP 27-36.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya, 2010- 2019. <http://www.bps.go.id>.
- Bassam A. AlBassam. 2013. The Relationship Between Governance and Economic Growth During Times of Crisis. *European Journal of Sustainable Development*. 2(4). Hal: 1-18
- Bhakti Setiawan dan Abdul Hakim. 2013. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Economia*. Vol. 9, No. 1. Hal: 18-24.
- Cooray, Arusha. 2009. Government Expenditure, Governance and Economic Growth. *Comparative Economic Studies*. 51. Hal: 401-418.
- Dalamagas, Basil. 2010. Public Sektor and Economic Growth: The Greek Experience. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 32. Hal:277-288.
- Deinde, Gilbert dan Kehinde Oluwole. 2017. Government Expenditure and Economic In Nigeria : An Analysis With Dynamic Ordinary Least Squares. *International Journal Of Academic Research in Business and Social Sciences*. Vol. 7, No. 5, 2017. ISSN : 2222-6990
- Dewi, Putu Ayu Krisna dan Sutrisna, I Ketut. 2014. Pengaruh kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 4, No. 1. Universitas Udayana.
- Edogbanya, Adejoh. 2013. Revenue Generation: Impact on Government Developmental Effort (A Study of Selected Local Council in Kogi East Senatorial District). *Global Journal of Management and Business Research*.13(4). ISSN : 2249-4588.
- Engjell Pere. 2015. The Impact of Good Governance in the Economic Development of Western Balkan Countries. *European Journal of Government and Economics*, 4(1). ISSN: 2254-7088.
- Fajrii, Arman dan Yohanes. 2016. Dampak Otonomi Fiskal, Kinerja ekonomi, dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(2). Hal: 99-107.
- Fajrii, Muhammad, Arman Delis, dan Yohanes Vyn Amzar. (2016). Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, 9 (2), 89-176.

- Fasoranti, Mary Modupe. 2012. The Effect of Government Expenditure on Infrastructure on the Growth of the Nigeria Economy, 1997-2009. *International Journal of Economic and Financial Issues*. 2(4). Hal: 513-518.
- Hammod, Geoge W dan Mehmet S Tosun. 2009. "The Impact of Local Decentralization on Economic Growth: Evidence from U.S. Counties". Discussion Paper Series IZA DP No. 4574. Forschungs institut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor.
- Hukom, Alexandra. 2014. Hubungan Ketenagakerjaan dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 7. No. 2. Hal: 120-129.
- Liliana, Bunescu, Mihaiu Diana and Comaniciu Carmen. 2011. *Is There a Correlation between Government Expenditures, Population, Money Supply, and Government Revenues?*. *International Journal of Arts & Sciences*.4(12). PP: 241-254.
- Mahajan, Nayia dan Satish Verma. 2014. Financial Development and Economic Growth : A Case Of Indian Economy. *International Journal of Economics, Finance and Management*. Vol. 3, No.1. ISSN : 2307-2466.
- Mahendra dan Agung Ulupi. 2015. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.*E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 11(3). Hal: 863-877.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mehrara, Mohsen, Mosayeb Pahlavani, and Yoursef Elyasi. 2011. Government Revenue and Government Expenditure Nexus in Asian Countries: Panel Cointegration and Causality. *International Journal of Business and Social science*. 2(7). Hal: 199-207.
- Miranti, Riyana, Alan Duncan, and Rebecca Cassells. 2014. Revisiting the Impact of Consumption Growth and Inequality on Poverty in Indonesia during Decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*.50(3). Hal: 461-482.
- Nurudeen, A., and Usman, A. 2010. Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria, 1970-2008: A Disaggregate Analysis. *Business and Economic Journal*. 4. Hal: 1-11.
- Peggy dan Swaningrum. 2015. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1). Hal: 72-82.
- Putra, Sedana dan Sudibia. 2018. Pengaruh Faktor Sosial, Ekonomi, dan Demografi terhadap Pendapatan Usaha Sektor Informal di Desa Darmasaba. *Jurnal PIRAMIDA*. Vol. 14, No. 1. Hal : 49-58.
- Resosudarmo, B. P., and Abdurohman. (2018). Is Being Stuck with a Five Percent Growth Rate a New Normal for Indonesia ?. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. The Australian National University, 54 (2), 141-164.

- Rudy Badrudin dan Irawan Kuncorojati. 2017. The Effect Of District Own-Source Revenue And Balance Funds On Public Welfare By Capital Expenditure And Economic Growth As An Intervening Variable In Special District Of Yogyakarta. *JMK*, Vol. 19, No. 1. Hal: 54–59.
- Suartha dan Murjana Yasa. 2017. Pengaruh Kinerja ekonomi, Migrasi Masuk Terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Bangunan Penduduk Asli Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 10(1). Hal: 95-107.
- Sudiarta, Dewa Made dan Suyana Utama, Made. 2019. The Effect of Regional Financial Performance on Inclusive Economic Growth and Community Welfare in Regency/City in Bali Province. *South East Asia Journal of Contemporary Business and Law*. ISSN 2290-1560, Vol 18, Issue 5 February. Pp 260 – 269.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwandi, Made, 2000. Agenda Strategis Penataan Otonomi Daerah (Sebagai tindak UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999), *Makalah Work Shop Otonomi Daerah*, Kerjasama LPEM-UI dan IRIS Jakarta.
- Suyana Utama, Made. 2009. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Uhise, Stepvani. 2013. Dana Alokasi Umum Pengaruhnya Terhadap Kinerja ekonomi Sulawesi Utara dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.4. Hal 1677-1686.
- Wardani, Niken Kusuma. 2018. Pengaruh Aset Daerah, PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016). *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Widyasari, Nurul. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Naskah Publikasi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wijayanti, N.K.H. dan Darsana, I.B. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2008-2013). *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol. 4, No. 3. Hal: 1164-1193.
- Yanto, E., Ridwan, dan F. Vitayanti. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Katalogis*. Vol. 6, No. 2. Hal: 125-135.
- Zouhaier, Hadhek. 2012. Democracy, Investment and Economic Growth. *International Journal of Economics and Financial Issues*. Vol. 2, No. 3, 2012, Hal. 233-240.